



CO-WORKING SPACE DUKUNG PRODUKTIVITAS KINERJA

Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kota Yogya Dipertahankan

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya berkomitmen dalam menjamin keterbukaan informasi publik. Setiap pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pun dituntut memahami keterbukaan informasi publik karena telah menjadi kebutuhan masyarakat. Indeks sebagai peringkat pertama kota informatif di tingkat DIY pun akan terus dipertahankan.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kota Yogya Edy Sugiharta, mengaku pihaknya sudah memiliki mekanisme dalam mengelola keterbukaan informasi publik. "Bagi kami masyarakat itu memiliki hak dalam memperoleh informasi yang sifatnya publik. Terkait data dan informasi sesuai yang dijabarkan dalam regulasi dapat diakses melalui Jogja Smart Service (JSS) maupun opendata.jogjakota.go.id," tandasnya di sela sharing program di co-working space Dinas Komunikasi

Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon, Jumat (24/2).
 Tak sebatas menyajikan informasi, mekanisme tindak lanjut atas informasi atau aduan yang masuk juga telah disepakati bersama internal OPD di lingkungan Pemkot Yogya. Batas waktu tindak lanjut tersebut bahkan diupayakan lebih cepat dari standar yang telah ditetapkan.
 Dicontohkannya aduan masyarakat terkait kerusakan APILL harus sudah ada tindak lanjut maksimal dua jam setelah informasi diterima. Begitu juga aduan terkait kegawatdaruratan waktu respon-

nya harus lebih cepat dari standar. "Informasi itu pun langsung masuk ke OPD terkait disertai dengan notifikasi. Kami buatkan sistem yang integratif," tandasnya.
 Pembinaan dalam mekanisme keterbukaan informasi publik tersebut berpengaruh signifikan terhadap predikat Kota Yogya sebagai kota informatif peringkat pertama di DIY pada 2022 lalu. Padahal sebelumnya Kota Yogya berada di peringkat terbawah di DIY. Kondisi tersebut juga dialami Kota Cirebon. Bahkan lompatannya cukup tinggi, dari sebelumnya ranking 11 kota menuju in-

formatif mampu melonjak menjadi ranking dua kota informatif se Jawa Barat hanya dalam kurun waktu setahun.
 Menurut Edy, antara Kota Yogya dengan Kota Cirebon sebenarnya memiliki situasi yang hampir sama. Dari aspek teritorial, luas wilayahnya hampir sama. Kota Yogya hdnnya 32,5 kilometer persegi sedangkan Kota Cirebon 39 kilometer persegi. Kedua kota tersebut juga lekat dengan peninggalan budaya di masa kerajaan.
 Sementara Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon Egi Bahtiar, mengaku indeks keterbukaan informasi publik terbagi dalam tiga kategori yakni kota tidak informatif, menuju informatif, dan informatif. Indeks keterbukaan informasi di Kota Cirebon tidak terlepas dari kiprah dinas

terkait. Terutama DKIS Kota Cirebon yang dinilainya progresif. "Kunci utama itu PPID harus memahami apa itu keterbukaan informasi publik. Kemudian kepala dinasnya bisa dibalang gerak cepat. Jadi tidak sekadar mengiyakan namun juga langsung mengerjakan," tandasnya.
 Begitu juga dengan keberadaan co-working space yang berada di kompleks kantor dinas. Ruang terbuka tersebut mampu mendorong produktivitas kinerja para pegawai DKIS. Hal ini karena suasana bekerja menjadi lebih menyenangkan.
 Sedangkan Kepala DKIS Kota Cirebon Ma'ruf Nur-yasa, mengakui banyak ide yang muncul dengan memanfaatkan co-working space. Apalagi keberadaannya juga kerap dimanfaatkan kalangan jurnalis da-



KR-Ardhi Wahdan
Jajaran Diskominfosan Kota Yogya bersama DKIS Kota Cirebon di area co-working space setempat.

lam menjalankan aktivitasnya. Dengan begitu ada kolaborasi yang terbangun secara sinergis antara media massa dan pemerintah. "Co-working space ini biasanya kami gunakan untuk rapat, briefing maupun sosialisasi. Siapa pun bisa mengakses, syaratnya semua bisa produktif," katanya.

Terkait indeks keterbukaan informasi publik, diakuinya langkah awal ialah adanya komitmen. Pihaknya mengawali dengan deklarasi bersama guna menguatkan komitmen di tiap OPD. Selanjutnya program terus bergulir dengan pendampingan dari Komisi Informasi. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005